

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, *demos* berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi.¹

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya.² Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat yang sangat penting yaitu, demokrasi konsitusional.

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan

¹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004) hlm.35

² Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004) hlm.263

persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.³

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:⁴

- a. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintah yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Salah satu perubahan fundamental dalam UUD 1945 yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 awalnya, menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya

³ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2023 hlm. 115

⁴ Josep A. Scumpeter, *Capitalis, Sosialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2011 hlm.361

menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.⁵

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat. Pada hakekatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara diberbagai negara.

Wujud nyata demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratik. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat.

⁵ Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi Vol.7 No.3 Juni 2010, h.119

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai wujud rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan juga melalui partai politik. Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Keorganisasian partai politik ini sangat penting karena melalui partai politik warga negara dapat turut serta berpartisipasi terhadap proses pengelolaan negara. Indonesia menganut sistem multi partai, banyak partai politik di Indonesia pada awal pemilu dan muncul banyak lagi setelah reformasi. Di Indonesia calon legislatif harus merupakan perwakilan atau kader partai politik juga Presiden dan Wakil Presiden harus diusung oleh partai politik, sedangkan pilkada dapat diusung oleh partai maupun perseorangan dengan syarat yang sudah diatur (Budiardjo, 2008).

Berbicara tentang pemilu tidak lepas juga dari elektabilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Elektabilitas berarti keterpilihan, dalam politik kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan.

Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai (Meliala & Nurdiansyah, 2019).

Membahas tentang pemilu tidak terlepas dari perilaku pemilih yang akan mendukung dan memberikan suaranya terhadap partai politik dan calon Bupati pada saat pemilu. Pemilu merupakan instrumen untuk mengekspresikan pilihan politik rakyat. Perilaku pemilih dapat dipengaruhi dari kondisi politik dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih sehingga rakyat memilih calon pemimpinnya dalam pemilu.

2.2 Popularitas

Popularitas berarti ketenaran (Partanto,2001:601). Popularitas berasal dari kata populer, artinya dikenal dan disukai orang banyak (Poerwadarminta, 2006: 907). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia popularitas berarti ketenaran yang dimiliki seseorang (Poerwadarminta, 2006:769). Popularitas mempunyai arti yang sama dengan familiarity. Familiarity artinya sering terlihat atau sudah terkenal. Prinsip familiarity dicerminkan dalam peribahasa Indonesia, “Kalau tak kenal, maka tak sayang”.

Popularitas berasal dari kata populer dalam bahasa Latinnya “populous” yang artinya rakyat banyak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata populer memiliki beberapa arti yaitu (1). Dikenal dan disukai orang banyak. (2). Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami banyak orang. (3). Disukai dan dikagumi orang banyak. Kesuksesan dalam dunia remaja seringkali digambarkan oleh popularitas.

Teori yang mendasari popularitas biasanya terdiri dari konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana popularitas terbentuk, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku, dan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan atau menurunkan popularitas seseorang atau sesuatu. Popularitas bisa dilihat melalui beberapa aspek atau dimensi seperti familiaritas, citra positif, dan daya tarik atau kharismatik tetapi pengaruh dan pembentukannya dijelaskan melalui teori-teori tertentu.

Menurut Nimmo, dengan adanya modal popularitas maka akan lebih mudah bagi seseorang atau figur tersebut untuk mencuri perhatian masyarakat, melalui pemberitaan media yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan atau mendongkrak elektabilitas. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dibangun pencitraan yang baik ditengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut.

Popularitas merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh siapapun untuk terjun dalam publik. Popularitas seseorang dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung seseorang untuk memperoleh kekuasaan. Pemilihan umum, Pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah, kepopuleran seorang calon atau kontestan sangat mendominasi dan menentukan bagi pilihan ditentukan oleh rakyat.

Menurut Kanthi Pamungkas Sari dan Suliswiyadi dalam tulisannya yang berjudul “Perilaku Memilih (Voting Behavior) Masyarakat Dalam Pemilu” (Sari, 2016) ada beberapa indikator dalam popularitas, yaitu:

1. Pengetahuan terhadap calon kandidat

2. Penegatuan calon dari media
3. Hubungan dengan calon yang dipilih
4. pengetahuan *track record* kandidat

Popularitas itu sendiri memiliki fungsi penting dalam meningkatkan elektabilitas, yaitu seorang kandidat dengan popularitas tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan umum karena Masyarakat lebih mengenal dan menerima mereka. Dalam menaikkan popularitas pengaruh dari media massa, terutama televisi, berperan besar dalam meningkatkan popularitas politikus. Penggunaan media massa seperti iklan, berita, dan acara hiburan dapat memperbaiki citra politikus dan meningkatkan keterkenalannya dalam Masyarakat.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas pada perilaku pemilih seperti adanya keadaan politik, sosial, ekonomi dan Pendidikan mempengaruhi perilaku pemilih. Pemilih memilih berdasarkan karakteristik pribadi, pengalaman dan kepercayaan mereka. Popularitas selebriti dan tokoh politik dapat mempengaruhi Keputusan pemilih, terutama bagi pemilih pemula, sebesar 14,3% untuk selebriti dan 19,2% untuk tokoh politik.⁷

⁶ Rahmat Edi Irawan, *Popularitas Politikus: Antara Kerja Politik atau Kehebatan Televisi*. Humaniora, Vol.5, No.2 Oktober 2014

⁷ Meike Kurniawati, 2023. *Pengaruh Selebritis, Tokoh Politik & Perilaku Memilih Dalam Pemilu Pada Pemilih Pemula*. Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol.1, No.2, Juni 2023

2.3 Elektabilitas

Menurut Dendy Sugiono (2008, Kamus Bahasa Indonesia, hal. 29), elektabilitas dijelaskan sebagai berikut: Elektabilitas adalah tingkat elektabilitas yang disesuaikan dengan kriteria seleksi. Electorability dapat berlaku pada barang, jasa atau orang, lembaga atau partai politik. Elektoralitas sering dibahas sebelum pemilu. Elektabilitas partai mengacu pada tingkat elektabilitas suatu partai di mata masyarakat. Tingginya elektabilitas suatu partai politik berarti partai tersebut mempunyai hak suara yang lebih tinggi.

Dalam penelitian, elektabilitas sering digunakan untuk menilai kekuatan kandidat di mata publik. Elektabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti popularitas, rekam jejak, kharisma, citra publik, dan daya tarik kebijakan. Meskipun penting dalam penelitian politik, elektabilitas sendiri tidak memiliki teori khusus yang berdiri sendiri; justru, konsep elektabilitas dijelaskan dan dipahami melalui teori-teori terkait dalam ilmu politik, psikologi sosial, dan komunikasi.

Untuk meningkatkan elektabilitas, calon peserta pemilu harus memenuhi standar pemilu dan populer. Sedangkan visibilitas mengacu pada seberapa terkenalnya Anda di mata masyarakat. Meskipun populer, mungkin tidak layak untuk dipilih. Sebaliknya, walaupun mereka punya hak pilih dan layak dipilih, namun karena tidak dikenal masyarakat, masyarakat tidak akan memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas, sangat bergantung pada teknik kampanye yang digunakan. pada masyarakat terbelakang Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan jumlah pemilih. Ada gerakan yang menyentuh

kepentingan rakyat, ada pula gerakan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Ada juga kampanye yang menyamar sebagai investigasi yang bertujuan mempengaruhi masyarakat. Seseorang yang kesulitan dalam mengambil keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan-lawannya.

Kita bisa mengukur kemampuan elektoral suatu partai melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai kemampuan elektoral dan citra politik menjadi bermakna. Elektoralitas Dalam dunia politik dikenal dengan konsep elektabilitas. Oleh karena itu, seseorang atau lembaga yang terpilih adalah yang mampu meraih simpati dan empati banyak orang sehingga membuat banyak orang ingin memilih atau bahkan memilikinya. Popularitas lebih berkaitan dengan seberapa terkenal seseorang, baik positif maupun negatif. Dalam masyarakat, orang yang populer seringkali dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat dengan elektabilitas tinggi adalah masyarakat populer.

Faktanya, kedua pernyataan itu benar. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan beriringan. Terkadang justru sebaliknya. Elektabilitas digunakan sebagai ukuran utama keberhasilan, dan mereka yang memenuhi syarat namun tidak berada dalam lingkaran kekuasaan akan dipinggirkan. Sebaliknya, mereka yang menjadi pusat perhatian akan diperebutkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kesadaran politik yang rendah, tingkat literasi yang rendah, dan partisipasi politik masyarakat yang rendah. Ada beberapa indikator utama kepopuleran seorang tokoh, antara lain menduduki posisi strategis, sering tampil di berbagai media massa, dan

mempunyai citra positif terhadap karakter kuat dan sikap tangguh. Pemerintah atau lembaga terpilih secara otomatis mendapat penerimaan dan dukungan mayoritas rakyat karena mereka mengenal individu-individu dan mempercayai mereka secara keseluruhan dan nilai-nilai serta kepentingan mereka akan dilindungi dan diwujudkan. Masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu secara politik dan teknis menyelesaikan masalah ini.

Tolak ukur elektabilitas itu sendiri bisa dilihat dari beberapa indikator sebagai parameter diantaranya yaitu :

1. Kredibilitas

Kredibilitas atau dengan kata lain kepercayaan publik untuk mengukur sejauh mana suatu kandidat mendapat kepercayaan dari masyarakat.

2. Rekam Jejak

Rekam jejak tentunya merupakan faktor yang vital, pemilih sering kali mempertimbangkan pengalaman kandidat dengan jabatan barunya nanti.

3. Daya Tarik Program

Menawarkan program untuk menarik minat pemilih dan apakah ada kesamaan visi misi terkait isu-isu penting antara kandidat dan pemilih.

Asep Warlan Yusuf, pengamat politik Universitas Parahyangan Bandung, mengatakan tingginya angka elektabilitas tidak ada artinya tanpa faktor pendukung lainnya. Dukungan partai, data survei intra-partai, dan kebijakan di tingkat partai pada umumnya harus demikian Keputusan pengurus pusat masing-masing pihak.

Jika kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas di atas, maka dapat diasumsikan bahwa elektabilitas meliputi: perilaku, kepribadian, sikap, dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, sedangkan kepribadian dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur-unsur seperti pengetahuan, sikap, dan dukungan yang dimiliki penonton.

2.4 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti merupakan keikutsertaan seorang warga negara dalam pemilu. Bentuk-bentuk perilaku pemilih yang dimaksud mencakup partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye, keterlibatan mereka dalam partai politik, hingga puncaknya berupa partisipasi dalam proses pemungutan suara (voting). Perilaku pemilih dapat dipahami sebagai tingkah laku memilih atau tindakan individu yang memiliki hak pilih dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilu, serta latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut.

Perilaku pemilih dapat merujuk pada adanya persepsi positif dan negatif dalam perjalanan perilaku memilih individu atau perseorangan. Hal ini mengacu pada pendapat, jika pendapat tersebut positif maka pemilih cenderung memilih dalam konteks presiden atau partai yang berkuasa dan sebaliknya jika pendapat tersebut negatif maka pemilih akan lebih cenderung memilih calon presiden atau partai tersebut yang dianggap oposisi. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya persoalan politik dan kebijakan, ada juga kelompok masyarakat

yang memilih calon karena dianggap mewakili agama atau keyakinannya, sedangkan kelompok lain memilih calon politik tertentu karena dianggap mewakili kelas sosialnya. Bahkan ada pula kelompok yang melakukan voting untuk menyatakan kesetiaannya terhadap karakter tertentu.

Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Putra, 2004:201)

2.4.1 Pendekatan Sosiologis

Seperti yang dikemukakan Paul F. Lazarsfeld (Mazhab Colombia), Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan kelompok sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Kelompok sosial tersebut, seperti berdasarkan usia (tua dan muda), gender (laki-laki dan perempuan), agama, dan sebagainya, dinilai cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu, pahamiilah kelompok sosial, termasuk kelompok formal seperti keanggotaan seseorang pada organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok pekerjaan, dan lain-lain, serta kelompok informal seperti keluarga, persahabatan, atau kelompok kecil lainnya.

Hal ini penting untuk memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keanggotaan seseorang pada kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih dalam suatu pemilu. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi interaksi antar anggota

kelompok, organisasi profesi, dan kelompok kerja sehingga memunculkan gagasan untuk mendukung salah satu calon legislatif peserta pemilu. Gerald Pomper merinci dampak pengelompokan sosial dalam studi perilaku memilih dalam dua variabel, yaitu kecenderungan sosial ekonomi (predisposisi) pemilih dan keluarga pemilih. Preferensi politik ayah atau ibu akan mempengaruhi preferensi politik anak, sedangkan orientasi sosial ekonomi meliputi agama, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografi, dan lain-lain. (A.Rahman Zainuddin: 2006: 47-48)

Hubungan antara agama dan perilaku memilih nampaknya sangat berpengaruh, nilai-nilai agama selalu hadir dalam kehidupan pribadi dan publik dan dianggap mempengaruhi kehidupan politik dan pribadi pemilih. Dalam partai politik, agama dapat memperoleh dukungan politik dari pemilih berdasarkan teologi, ideologi, solidaritas, dan kesamaan emosional. Fenomena partai politik berbasis agama dinilai memiliki daya tarik yang kuat terhadap preferensi politik.

Dalam literatur perilaku pemilih, aspek keagamaan menjadi perhatian penting. Pemilih cenderung memilih partai agama tertentu yang sejalan dengan keyakinan agamanya. Di Indonesia, faktor agama masih dianggap penting bagi sebagian besar masyarakat. Misalnya saja yang diutarakan Sulhardi (April 2008) bahwa umat Islam cenderung memilih partai Islam dan sebaliknya, non-Muslim cenderung memilih partai non-Muslim. Inti dari pendekatan ini Pemilih cenderung memilih kandidat atau

partai yang dianggap mempresentasikan atau nilai-nilai dari kelompok sosial mereka, seperti kelas ekonomi, agama, atau etnis.

2.4.2 Pendekatan Psikologis

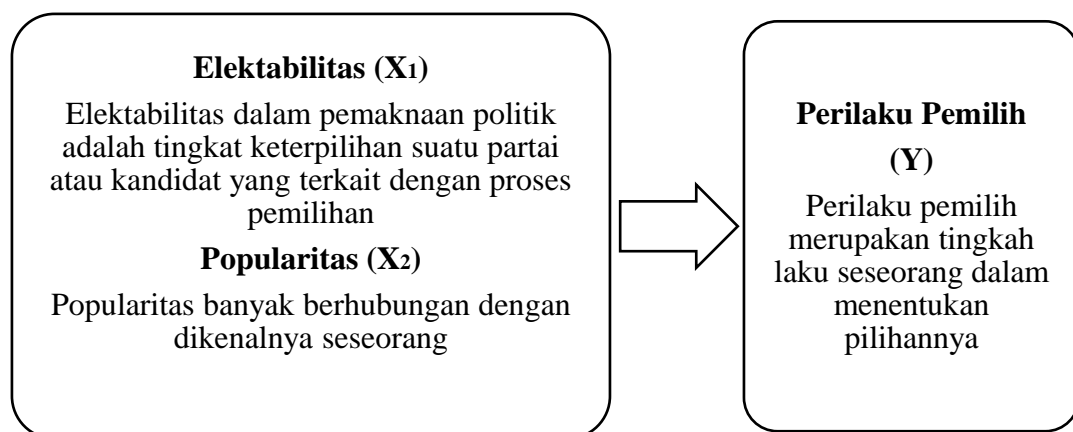
Pendekatan Psikologis atau yang banyak diketahui sebagai Mahzab Michigan. Model ini dikenalkan oleh Angus Campbell (Efriza 2012: 503). Menurut Adman Nursal (2004:59) mazhab ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari.

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Efriza, 2012:505), dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian terhadap tema-tema yang diangkat; (3) identifikasi partai. Pendekatan psikologis ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu.

Pendekatan psikologis memberikan pemahaman bahwa perilaku memilih tidak hanya didasarkan pada kalkulasi rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh identifikasi emosional, persepsi individu, dan afiliasi

jangka panjang terhadap partai atau kandidat. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa pemilih sering setia pada partai atau kandidat tertentu meskipun terjadi perubahan dalam isu atau kondisi politik. Dalam penelitian, pendekatan ini sering digunakan untuk mengkaji sikap, loyalitas partai, dan pengaruh faktor sosial terhadap keputusan memilih.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, selain untuk memilih DPR, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah. Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonom baru sejak tahun 2012, pilkada baru dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2020, keduanya dimenangkan oleh Jeje Wiradinata.

Menuju pilkada mendatang tahun 2024, istri Jeje Wiradinata yaitu Ida Nurlaela Wiradinata direncanakan untuk maju menjadi calon legislatif dapil x

Jabar. Hal tersebut dibuktikan dengan terpampangnya baliho-baliho bergambar sosok Ida Nurlaela Wiradinata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran. Popularitas dan elektabilitas adalah 2 hal penting yang saling berkaitan dengan keterpilihan Ida Nurlaela Wiradinata.

Sebagai istri bupati Pangandaran, Ida Nurlaela Wiradinata memiliki popularitas yang tinggi seharusnya di mata masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dengan modal tersebut Ida Nurlaela Wiradinata memiliki peluang yang cukup besar untuk meraup suara di Kabupaten Pangandaran diantara wilayah lainnya yang termasuk kedalam dapil x seperti Ciamis, Banjar dan Kuningan.. Terlebih Ida juga maju dengan kendaraan politik yang sama yaitu dengan partai PDI Perjuangan. Kendati demikian popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata dapat mempengaruhi perilaku memilih Masyarakat Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

2.6 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator
Elektabilitas X1	Elektabilitas merupakan Tingkat atau kemungkinan seseorang yang bersaing dalam sebuah pemilihan untuk memenangkan suara pemilih atau mendapatkan dukungan dari pemilih	1.kredibilitas 2.rekam jejak 3.daya Tarik program	1.Intens pemilih 2.Kepuasan pemilih 3.Respon terhadap kampanye 4.Reputasi Ida Nurlaela Wiradinata
Popularitas X2	Popularitas merupakan tingkat kepopuleran atau keterkenalan seseorang	1. Familiaritas 2. Pengetahuan calon dari media 3. Hubungan dengan calon yang dpilih 4. Track record	1.seberapa kandidat dikenal 2.persepsi mengenai kandidat 3.penilaian publik

<p>Perilaku Pemilih Y</p>	<p>Perilaku pemilih merupakan kegiatan memilih individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (pemilihan langsung). Jika seorang pemilih memutuskan untuk memilih, maka pemilih memilih atau mendukung calon tertentu.</p>	<p>1.Pendekatan Sosiologis 2.Pendekatan psikologis</p>	<p>1.meliputi pertanyaan tentang pengaruh keluarga terhadap nilai-nilai dan preferensi politik, serta pertimbangan demografi 2. Mengukur tingkat identifikasi terhadap partai politik atau kandidat serta Mengukur persepsi pemilih terhadap partai atau kandidat tertentu, serta preferensi mereka</p>
---------------------------	---	--	---